

# Kompetisi Hegemoni, PANCASILA, dan Indonesia 2045

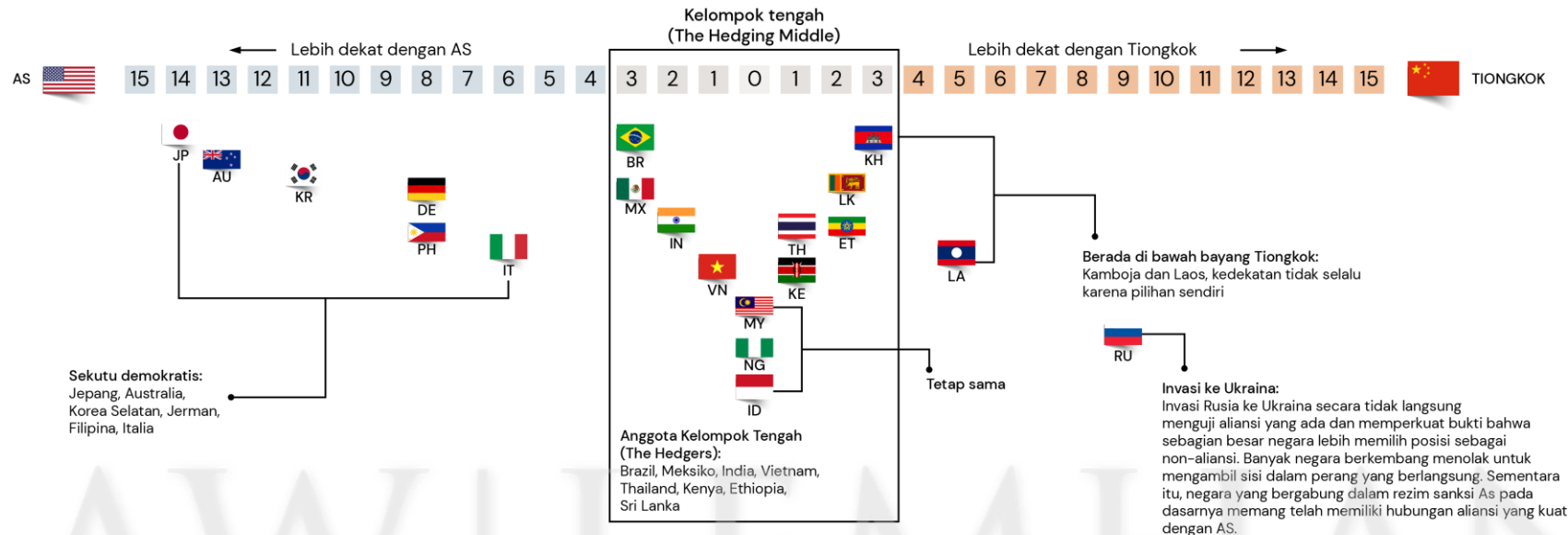
Andi Widjajanto



# Lanskap Geopolitik

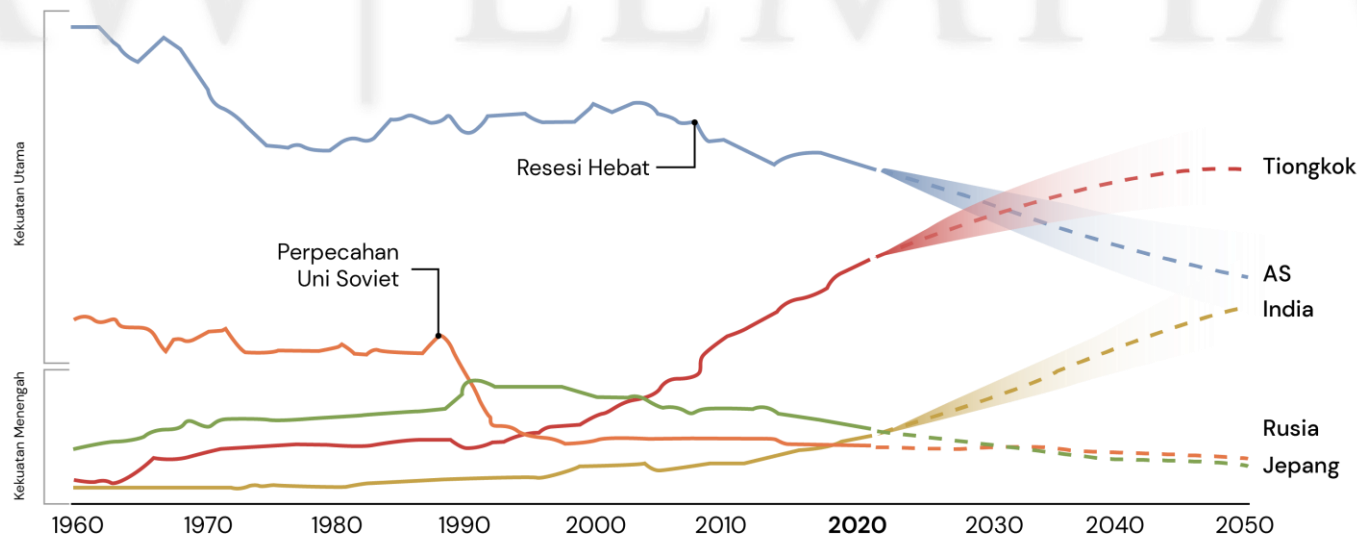


## Index Keterpaduan Geopolitik



Rekam Jejak dan Proyeksi Indeks Kekuatan Global (GPI)

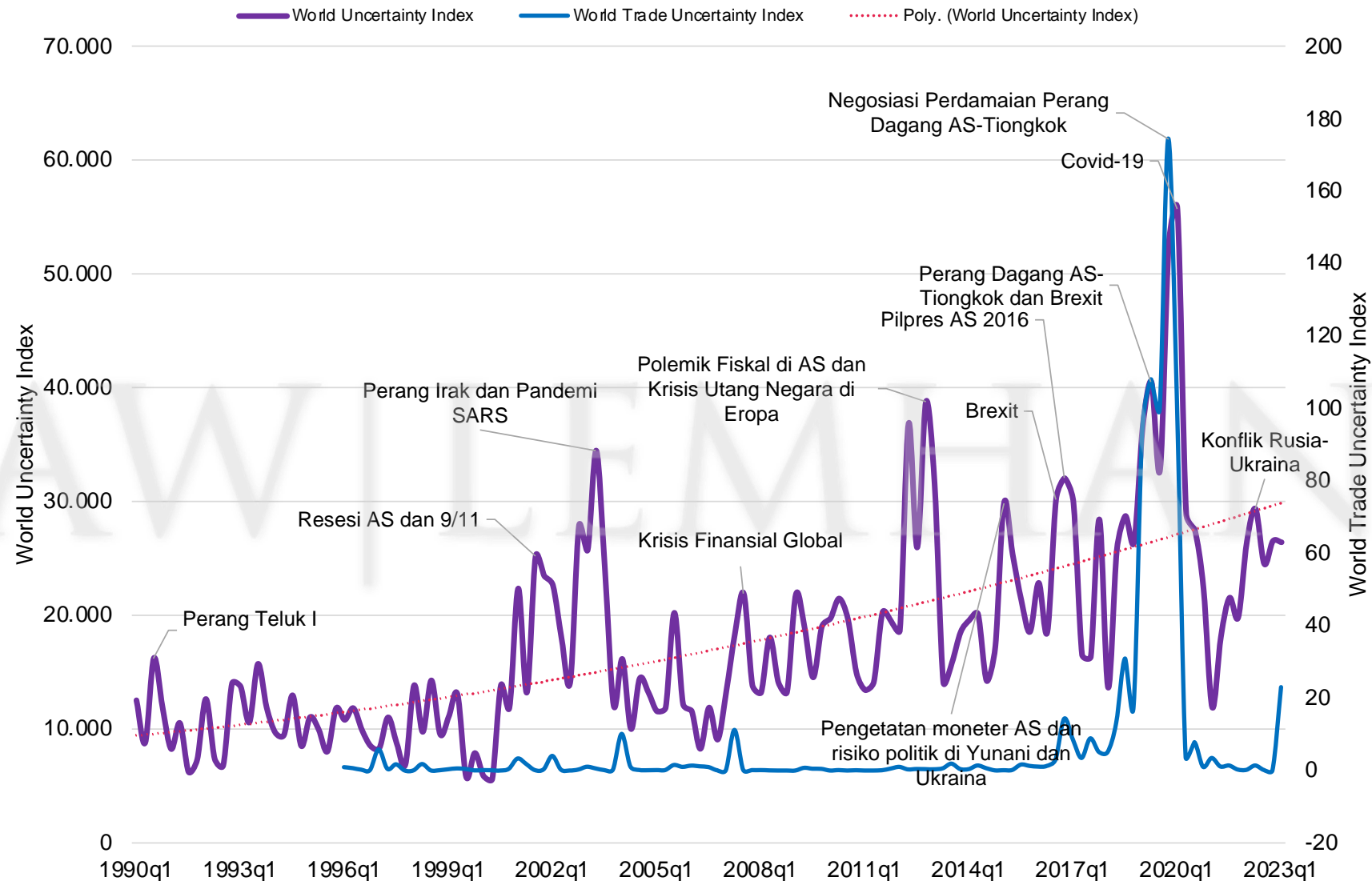
Ilustrasi jangkauan ketidakpastian



**Asesmen terhadap Indeks Keterpaduan Geopolitik** atau Geopolitical Alignment Index terhadap 20 negara menghasilkan beberapa catatan. **Pertama**, arsitektur geopolitik masih condong memberikan keuntungan bagi AS, dari aspek aliansi. Hal tersebut sejalan dengan posisi AS sebagai pusat dari jaringan global. **Kedua**, Asia menjadi blok utama yang mempertahankan posisi non-blok dan berusaha untuk menghindari dari mengambil posisi dalam kompetisi AS-Tiongkok.

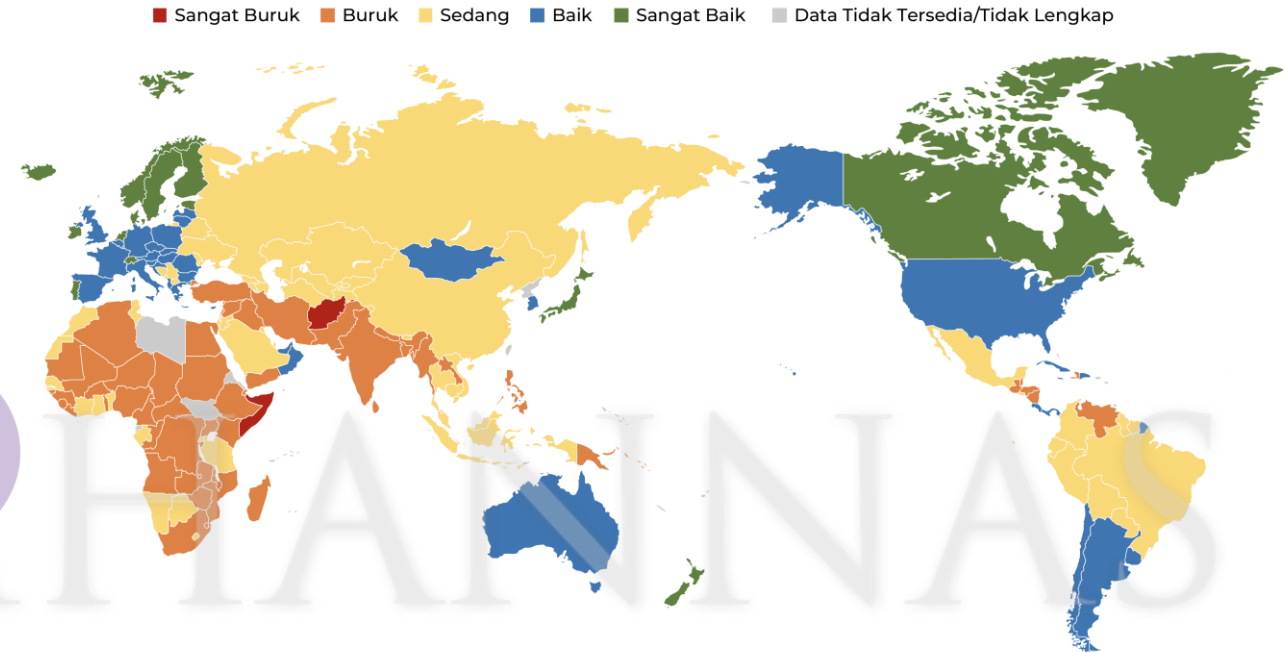
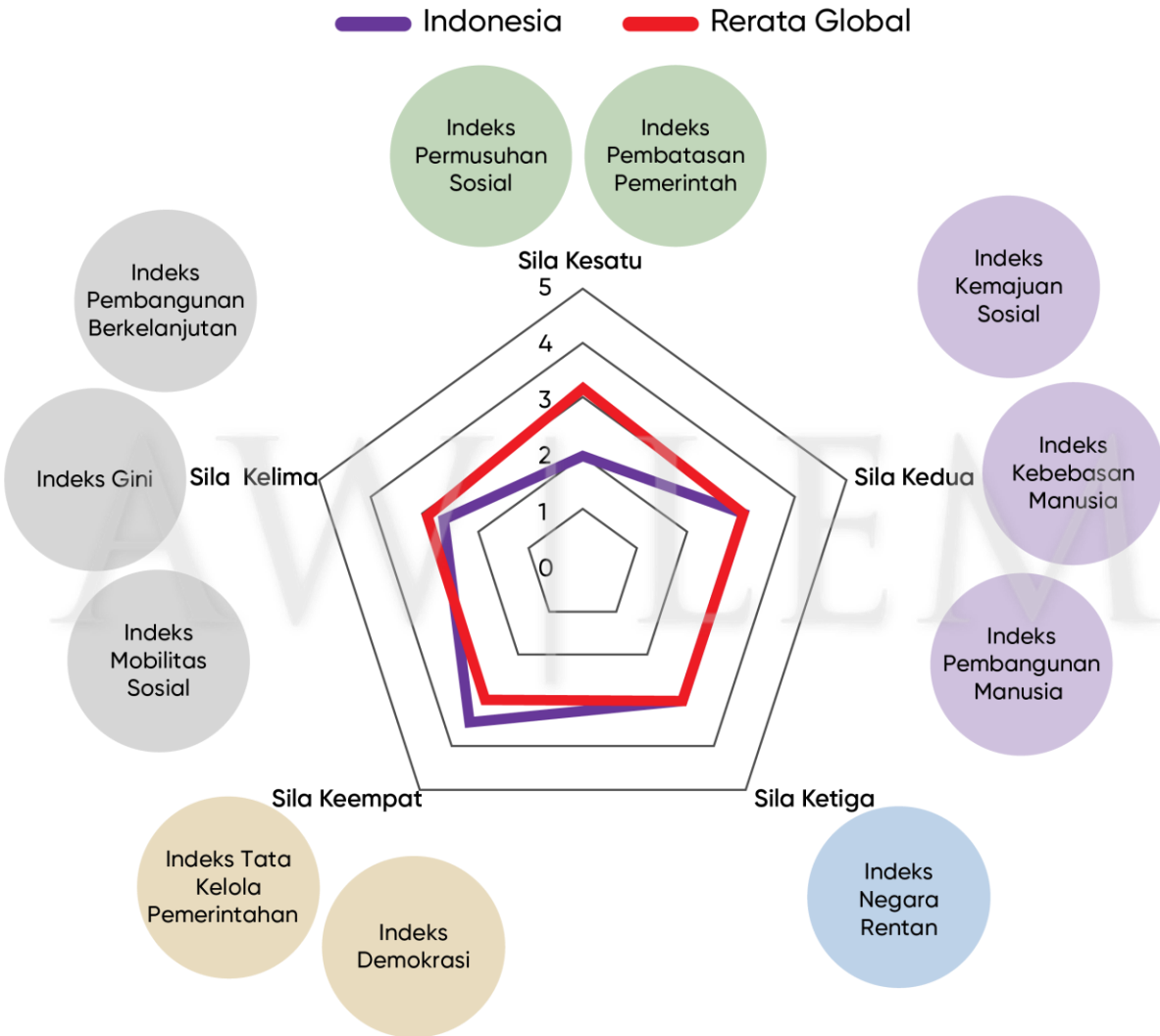
Selanjutnya studi RAND turut melihat perkembangan lingkungan strategis dalam kompetisi global yang menunjukkan bahwa terhadap pergeseran dari model unipolar menuju rangkaian kekuatan yang lebih luas dan bervariasi.

# Ketidakpastian Global



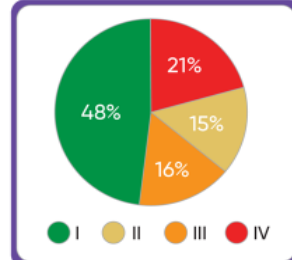
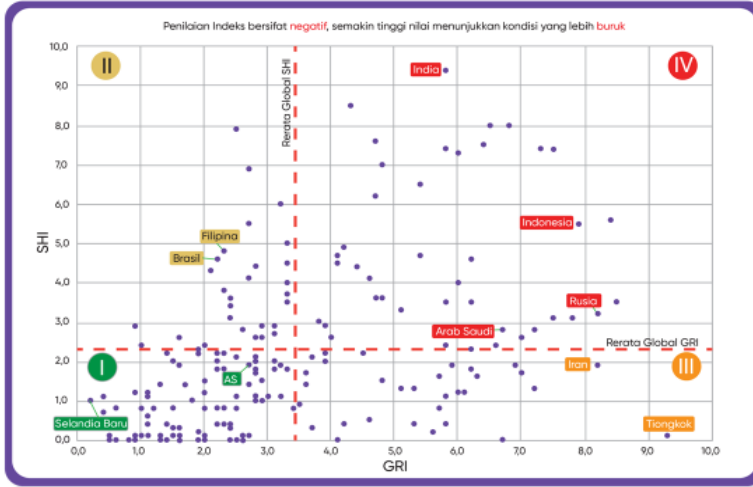
Setelah melewati masa kritis selama Pandemi Covid-19, ketidakpastian kembali membayangi situasi global. Konflik Rusia-Ukraina, lonjakan harga pangan dan energi, peningkatan inflasi, kebijakan menaikkan suku bunga acuan bank sentral, dan peningkatan intensitas kontestasi geoekonomi mengancam proses pemulihan dan menghambat realisasi potensi pertumbuhan ekonomi global.

# Geopolitik Pancasila



Agregat indeks global yang mengukur isu-isu prioritas Pancasila menunjukkan **posisi Indonesia belum optimal**. Pemetaan global menunjukkan posisi Indonesia masih berada di posisi **sedang**. Masih terdapat penerapan isu di tingkat nasional yang berada di **bawah** rerata standar global. Secara khusus, pelaksanaan isu-isu prioritas di sila kesatu dan kelima memiliki jarak yang paling signifikan dengan rerata global. Di sisi lain, Indonesia dinilai telah melaksanakan sila keempat relatif **baik** ketika dibandingkan dengan rerata standar global. Lebih lanjut, Posisi Indonesia pada pelaksanaan isu-isu di sila kedua dan ketiga cenderung berada di sekitar ambang batas rerata global.

## Indeks Hambatan Beragama



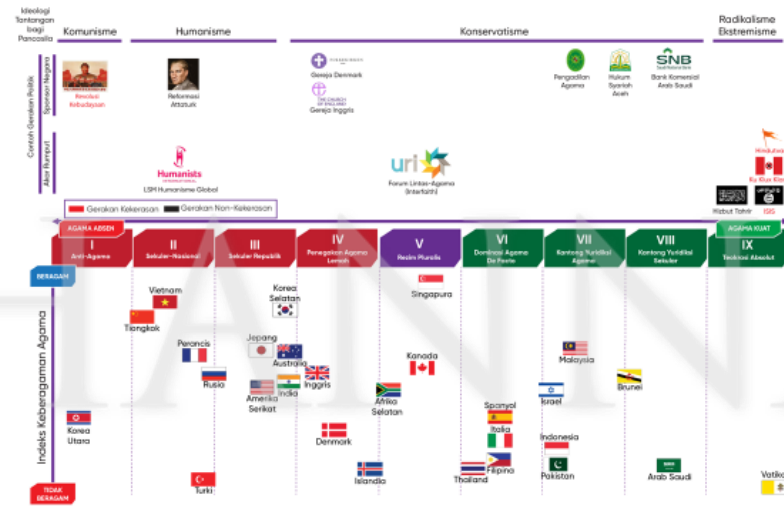
Mayoritas negara sudah berada pada **kuadran I**. Kondisi ini menunjukkan banyak negara cukup baik dalam menjamin kebebasan beragama. **Indonesia** sendiri berada di **kuadran IV** yang menunjukkan tingkat hambatan yang tinggi.

| Variabel              | Indonesia | Rerata |
|-----------------------|-----------|--------|
| Pembatasan Pemerintah | 7,9       | 3,4    |
| Kebencian Sosial      | 5,5       | 2,2    |

■ Lebih Baik dari Rerata Global    ■ Lebih Buruk dari Rerata Global

Sumber: Diolah dari Pew Research Center Religious Restriction Index (2022)

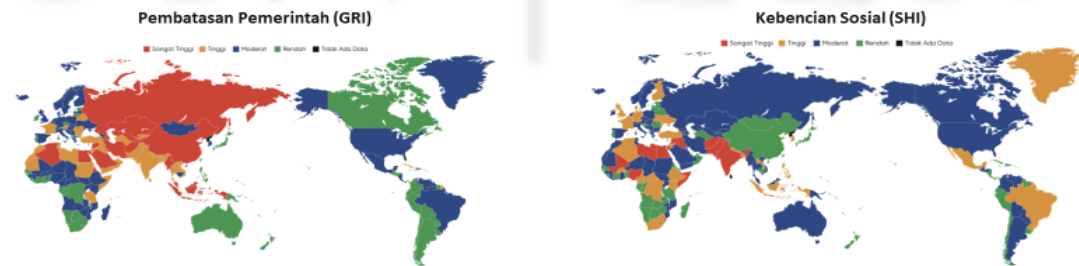
## Bedah Literatur “Posisi Agama dalam Negara”



Secara konkret, agama saat ini masih menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kelola negara. Merujuk tipologi Hirschl, **Indonesia** berada di **kategori VII “Kantong Yurisdiksi Agama”** yang ditandai dengan adanya otoritas khusus bagi institusi berbasis keagamaan. Sebagai contoh Indonesia memiliki pengadilan agama dan Provinsi Aceh yang menjalankan hukum Islam. Dominasi nilai-nilai keagamaan juga dinilai cukup mengakar kuat dalam regulasi yang menyangkut masyarakat umum.

Catatan: Posisi horizontal negara mengacu penilaian dari tipologi Hirschl sementara posisi vertikal merujuk Religious Diversity Index dari Pew Research Center

## Indeks Hambatan Beragama



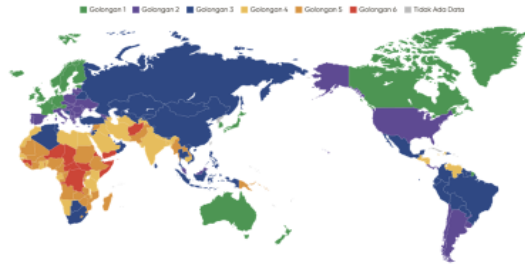
**Indeks Hambatan Beragama** (Religious Restriction Index) dari Pew Research Center mengukur tantangan yang dihadapi individu dalam menjalankan kepercayaannya di suatu negara. Indeks ini terdiri dari dua dimensi, yakni kebijakan pembatasan pemerintah (Government Restriction Index/GRI) terdiri dari dua puluh indikator dan resistensi masyarakat (Social Hostility Index/SHI) yang mencakup tiga belas indikator.

Posisi **Indonesia** dalam indeks ini relatif **buruk**. Posisi Indonesia di kedua dimensi lebih buruk dari rerata global. GRI menjadi menjadi dimensi dengan capaian terburuk. Indikator yang diukur GRI mencakup: adanya upaya otoritas untuk melarang kelompok keagamaan tertentu, pembatasan kegiatan dakwah, pemberian preferensi khusus terhadap kelompok tertentu, hingga persekusi terhadap kelompok keagamaan.

Sumber: Diolah dari Pew Research Center Religious Restriction Index (2022)



## Indeks Pembangunan Manusia

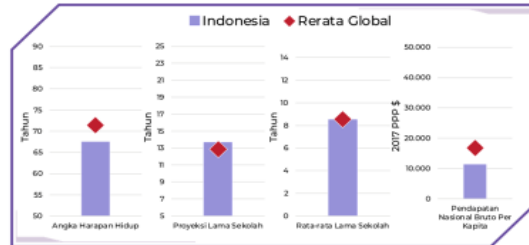


Indeks Pembangunan Manusia dirilis oleh United Nations Development Programme (UNDP). Indeks ini merupakan komposit atas angka harapan hidup, tingkat pendidikan (ekspektasi dan rata-rata sekolah), dan pendapatan nasional bruto per-kapita yang dinilai menjadi indikator kunci bagi taraf hidup manusia.

Indonesia menduduki peringkat 114 dari 191 negara yang diukur. Posisi ini berada di antara Lebanon dan Vietnam. Indonesia masuk dalam kategori **tinggi** meski berada di posisi dua terendah dalam klasifikasi tersebut. Secara umum, skor Indonesia berada **di bawah** rerata global. Indonesia terpantau memiliki skor **di atas** rerata global pada proyeksi lama sekolah.

Sumber: Diolah dari United Nations Development Programme Human Development Report (2022)

### Posisi Relatif Indonesia



| Variabel   | Indonesia | Rerata |
|--|-----------|--------|
| Indeks Pembangunan Manusia                         | 0,705     | 0,732  |
| Angka Harapan Hidup (Tahun)                        | 67,6      | 71,4   |
| Proyeksi Lama Sekolah (Tahun)                      | 13,7      | 12,8   |
| Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)                     | 8,6       | 8,6    |
| Pendapatan Nasional Bruto Per Kapita (2017 PPP \$) | 11.466    | 16.752 |

## Indeks Progres Sosial

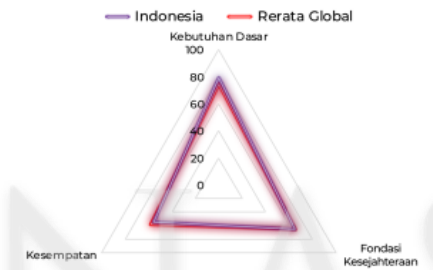


Indeks Progres Sosial dirilis oleh Social Progress Imperative. Indeks ini mengukur kemampuan negara memberikan kualitas hidup yang maksimal bagi masyarakatnya. Indeks ini memiliki tiga variabel (kebutuhan dasar, fondasi kesejahteraan, dan kesempatan) yang terbagi dalam 45 indikator.

Posisi Indonesia dalam Indeks Progres Sosial berada di **golongan tiga** dengan skor sedikit **di atas rerata global**. Indonesia berada di peringkat **ke-87** dari 169 negara. Posisi ini berada di antara Fiji dan Turki. Indonesia masih lemah dalam variabel Kesempatan, khususnya dalam aspek kebebasan beragama, kerawanan sektor ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial.

Sumber: Diolah dari Social Progress Imperative Social Progress Indeks (2022)

### Posisi Relatif Indonesia



| Variabel              | Indonesia | Rerata |
|-----------------------|-----------|--------|
| Indeks Progres Sosial | 66,67     | 66,16  |
| Kebutuhan Dasar       | 78,89     | 74,42  |
| Fondasi Kesejahteraan | 65,23     | 65,55  |
| Kesempatan            | 55,89     | 58,24  |

## Indeks Kebebasan Manusia

| Variabel                          | Indonesia | Rerata |
|-----------------------------------|-----------|--------|
| Kebebasan Manusia                 | 4,58      | 5,18   |
| Kebebasan Personal                | 4,49      | 4,86   |
| Penegakan Hukum                   | 4,56      | 5,12   |
| Kedamaian                         | 4,38      | 4,03   |
| Bergerak                          | 4,15      | 4,45   |
| Agama                             | 5,76      | 182    |
| Berserikat                        | 4,17      | 4,96   |
| Ekspresi dan Informasi            | 4,31      | 4,27   |
| Identitas dan Hubungan Personal   | 5,42      | 4,39   |
| Kebebasan Ekonomi                 | 4,09      | 4,75   |
| Ukuran Pemerintahan               | 4,01      | 4,00   |
| Sistem Legasi dan Prosedur        | 4,90      | 5,36   |
| Keruangan                         | 4,18      | 4,24   |
| Pertanggung-jawaban Internasional | 4,40      | 4,42   |
| Regulasi                          | 4,44      | 4,75   |

Indeks Kebebasan Manusia dirilis oleh Cato Institute. Indeks ini menilai kemampuan negara menyediakan kebebasan bagi seluruh warga negara, khususnya di ranah personal dan ekonomi. Indeks Kebebasan Manusia terdiri dua variabel, tiga belas area isu, serta delapan puluh tiga indikator.

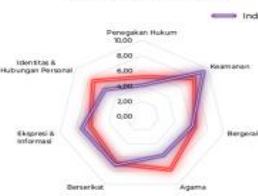
Skor Indonesia sedikit berada di **bawah rerata global**. Indonesia menduduki posisi **ke-85**, di antara Bhutan dan Nepal, dari 165 negara yang diukur. Indonesia dinilai lemah dalam variabel Kebebasan Personal, khususnya terkait penegakan hukum, kebebasan bergerak, agama, serta identitas dan hubungan personal. Penegakan hukum mencatatkan skor terendah. Isu ini mengukur imparsialitas, efektivitas dan akuntabilitas penegakan hukum, khususnya terkait dengan korupsi, diskriminasi, serta intervensi pemerintah.

Sumber: Diolah dari Cato Institute Human Freedom Index (2022)

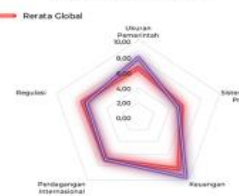
### Penilaian Indeks Kebebasan Manusia



### Kebebasan Personal

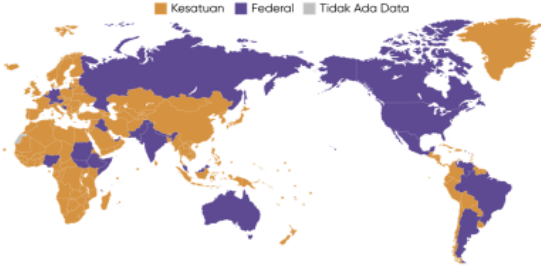


### Kebebasan Ekonomi



# Lanskap Bentuk Pemerintahan Negara

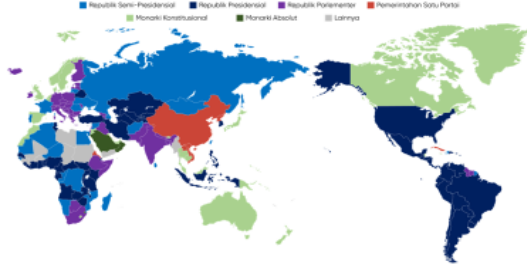
## Negara Berdasarkan Distribusi Otoritas



Negara kesatuan dan federal adalah sistem pemerintahan yang paling umum diadopsi. Pada negara kesatuan, pemerintah daerah idealnya hanya memiliki kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, pada negara federal, pemerintah daerah memiliki otoritas signifikan untuk mengatur wilayahnya. Sebagaimana dimandatkan oleh Pancasila, **Indonesia saat ini menganut sistem negara kesatuan**. Akan tetapi, pelaksanaan sistem negara kesatuan di Indonesia mengalami penyesuaian melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Lebih lanjut, Indonesia juga memperhatikan keberagaman dan kekayaan budaya di seluruh daerah yang tercermin dalam konsep **Bhinneka Tunggal Ika**.

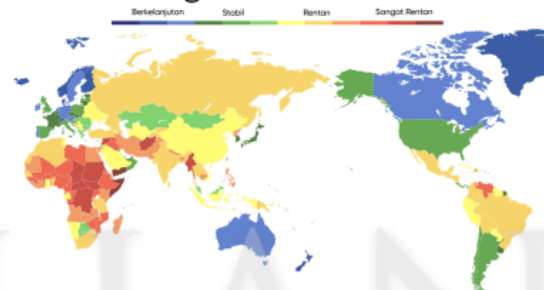
Sumber: Diolah dari berbagai sumber terbuka

## Negara Berdasarkan Sistem Pemerintahan



Sistem pemerintahan negara adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengatur dan memimpin masyarakatnya. Terdapat berbagai jenis sistem pemerintahan negara yang memiliki karakteristik tersendiri. Sistem yang saat ini diadopsi negara-negara antara lain **Presidensial, Semi-Presidensial, Parlemen, Monarki Absolut, dan Monarki Konstitusional**. Selain itu, terdapat sistem-sistem lain yang biasanya bersifat sementara, seperti junta dan pemerintahan transisi. **Indonesia sendiri menganut sistem Republik Presidensial**. Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

# Indeks Negara Rentan



## Posisi Relatif Indonesia



Penilaian indeks bersifat **negatif**. Semakin tinggi nilai menunjukkan kondisi yang lebih berbahaya. Di sisi lain, nilai mendekati nol menunjukkan kondisi yang lebih berkelanjutan

| Variabel             | Indonesia | Rerata |
|----------------------|-----------|--------|
| Indeks Negara Rentan | 46,60     | 65,86  |
| Peringkat Hankam     | 5,50      | 5,10   |
| Disintegrasi         | 6,80      | 5,62   |
| HAM dan Rule of Law  | 6,20      | 5,35   |
| Faksionalisasi Elite | 7,10      | 6,58   |
| Kebutuhan Dasar      | 6,20      | 5,59   |
| Tekanan Demografi    | 7,30      | 6,10   |
| Brain Drain          | 6,00      | 5,21   |
| Penurunan Ekonomi    | 4,20      | 5,60   |
| Kesenjangan Ekonomi  | 4,90      | 5,26   |
| Legitimasi Negara    | 4,90      | 5,73   |
| Pengungsi dan IDPs   | 4,30      | 4,66   |
| Intervensi Eksternal | 4,00      | 5,08   |

**Indeks Negara Rentan (Fragile State Index)** menjadi rujukan global untuk mengukur stabilitas dan persatuan suatu negara. Indeks ini mengukur empat isu, yakni kondisi kohesi negara, ekonomi, politik, dan sosial yang dijabarkan ke dalam dua belas indikator.

**Indonesia sudah masuk dalam kategori rentan**. Nilai agregat Indonesia berada di papan tengah dengan tujuh indikator yang lebih buruk dari rerata global. Kelemahan Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, sektor keamanan meliputi perangkat hankam dan disintegrasi. Dua indikator ini menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menangkal gangguan keamanan baik dari internal maupun eksternal. Kedua, sektor politik yang mencakup HAM dan *rule of law* serta faksionalisasi elite. Pelaksanaan Demokrasi menjadi aspek kunci dari dua indikator ini. Ketiga, sektor pembangunan manusia yang melingkupi pemenuhan kebutuhan dasar, tekanan demografi, dan brain drain. Penangkalan risiko dan pembangunan di tiga sektor utama ini dinilai menjadi modalitas utama untuk menjaga stabilitas dan persatuan nasional.

Sumber: Diolah dari Fund for Peace Fragile State Indeks (2022)

# Bedah Literatur "Teritori Negara"

## Negara Berdasarkan Cakupan Geografis

**Kontinental** Negara yang wilayahnya terletak di atas daratan utama. Wilayahnya dominan terdiri atas daratan.

**Kepulauan** Negara yang terdiri dari satu atau lebih pulau-pulau dan wilayah perairan di sekitarnya, yang membentuk suatu kesatuan geografis, politik, dan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan.

## Cara Negara Mengakuisi Teritori

- Ocupasi (Occupation)**: Mendirikan infrastruktur untuk memperkuat kehadiran di suatu kawasan
- Penambahan (Accretion)**: Lanskap baru terbangun secara gradual yang mengubah struktur teritori negara
- Penyerahan (Cession)**: Penyerahan teritori dari satu negara ke negara lainnya
- Aneksasi (Annexation)**: Menduduki wilayah negara lain dan kemudian mengklaimnya sebagai miliknya
- Preskripsi (Prescription)**: Mengklaim wilayah yang tidak diakui negara mana pun
- Pembelian**: Negara membeli teritori yang dimiliki negara lainnya

Sumber: diadopsi dari UU 17/1985 terkait Pengesahan UNCLOS dan Lothian (2017)

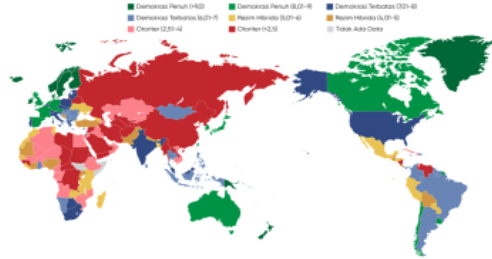
## Negara Kepulauan Berdasarkan UNCLOS



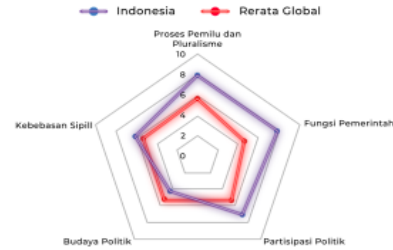
**Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS)** menjadi rujukan utama bagi negara kepulauan. UNCLOS mendefinisikan **negara kepulauan** sebagai negara yang terdiri dari satu atau lebih pulau-pulau dan wilayah perairan di sekitarnya, yang membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keuntungan menjadi negara kepulauan adalah memiliki hak kedaulatan penuh atas wilayah perairan di sekitar pulau-pulau yang dimilikinya. Pada mulanya hanya lima negara yang diakui sebagai negara kepulauan berdasarkan UNCLOS, yakni Indonesia, Bahama, Fiji, Papua Nugini, dan Filipina. Saat ini, status negara kepulauan telah diberikan pada 22 negara yang mayoritas terletak di Karibia dan Pasifik.

## Indeks Demokrasi

### Kondisi Demokrasi Global



### Posisi Relatif Indonesia



| Variabel                        | Indonesia | Rerata |
|---------------------------------|-----------|--------|
| Indeks Demokrasi                | 6,71      | 5,30   |
| Proses Elektoral dan Pluralisme | 292       | 5,60   |
| Fungsi Pemerintah               | 286       | 4,67   |
| Partisipasi Politik             | 222       | 5,65   |
| Budaya Politik                  | 4,38      | 5,35   |
| Kebebasan Sipil                 | 6,18      | 5,43   |

Indeks Demokrasi dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU). Indeks ini mengukur kondisi Demokrasi suatu negara berdasarkan 5 variabel dengan 60 indikator. Menurut pengukuran EIU, **Indonesia berada di kategori Demokrasi Terbatas**. Indonesia dengan meraih skor 6,71 yang berada di peringkat ke-54 dari total 165 negara yang dinilai. Skor Indonesia stagnan dari tahun sebelumnya tetapi peringkatnya turun sebesar dua peringkat. Indonesia relatif kuat dalam variabel Proses Elektoral dan Pluralisme yang meraih skor tertinggi. Akan tetapi, Indonesia dinilai masih sangat lemah dalam aspek Budaya Politik.

Sumber: Diolah dari Economist Intelligence Unit Democracy Index (2022)

## Indeks Pemerintahan Global

### Kondisi Pemerintahan Global



### Posisi Relatif Indonesia



| Variabel                        | Indonesia | Rerata |
|---------------------------------|-----------|--------|
| Kontrol Korupsi                 | -0,41     | -0,02  |
| Efektivitas Pemerintahan        | 0,38      | -0,03  |
| Stabilitas Politik dan Keamanan | -0,31     | -0,03  |
| Kualitas Regulasi               | 0,30      | -0,02  |
| Supremasi Hukum                 | -0,22     | -0,02  |
| Akuntabilitas dan Kebebasan     | 0,16      | -0,02  |

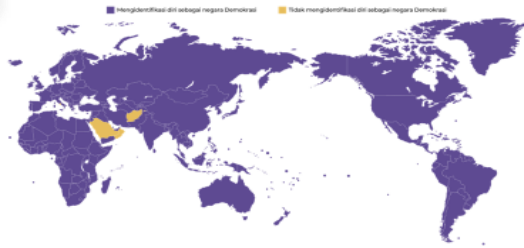
Indeks Pemerintahan Global dirilis oleh World Bank. Indeks ini mengukur tata kelola pemerintahan, mulai dari aspek institusional hingga kualitas perumusan kebijakan. Penilaian pada indeks ini merujuk pada enam variabel utama. Berdasarkan penilaian World Bank, tata kelola pemerintahan **Indonesia berada dalam kategori baik**. Akan tetapi, Indonesia dinilai relatif lemah dalam dua aspek, yakni kontrol korupsi dan supremasi hukum.

Sumber: Diolah dari World Bank Worldwide Governance Indicator (2022)

## Lanskap Demokrasi Global



### Mengidentifikasi Diri sebagai Negara Demokrasi

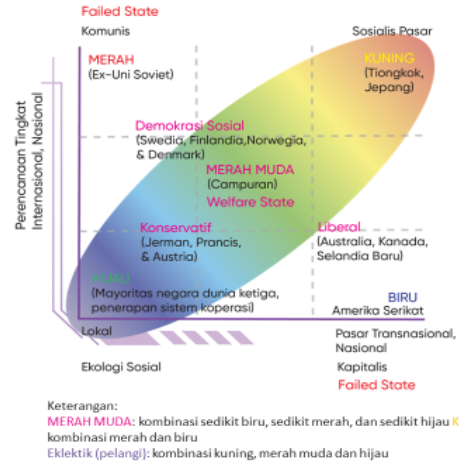


Banyak negara yang mengklaim dirinya sebagai **negara Demokratis** tetapi tidak semuanya mampu menjalankan prinsip Demokrasi secara penuh. Dengan membandingkan proses elektoral dan implementasi *rule of law*, kuadran di atas berusaha memetakan posisi negara-negara utama dalam lanskap demokrasi global. Banyak negara yang mengidentifikasi diri sebagai negara Demokratis justru berada di spektrum hibrida, bahkan otoritarianisme. **Indonesia dinilai masih berada di tahap Demokrasi Terbatas**. Banyak kajian yang menilai proses elektoral di Indonesia relatif mumpuni tetapi pelaksanaan *rule of law* dinilai belum optimal.

Sumber: Diolah dari berbagai literatur akademik



## Bedah Literatur “Keadilan Sosial”



Bedah literatur merujuk kepada **Johan Galtung** yang menyusun **enam pemikiran ekonomi** dalam simbol-simbol warna, merujuk pada lima indikator, terdiri dari (1) Individualisme vs kolektivisme; (2) Vertikal vs horizontal; (3) Monetisasi vs spesifisitas; (4) Proses vs alamiah; (5) Ekspansi vs stabilitas; dan (6) Alam vs ketiadaan. Selanjutnya, Galtung menghasilkan **tiga warna dasar**, terdiri dari merah, biru dan hijau. Sementara itu, tiga lainnya merupakan **kombinasi dari warna dasar**, yang menghasilkan warna merah muda, kuning, dan pelangi.

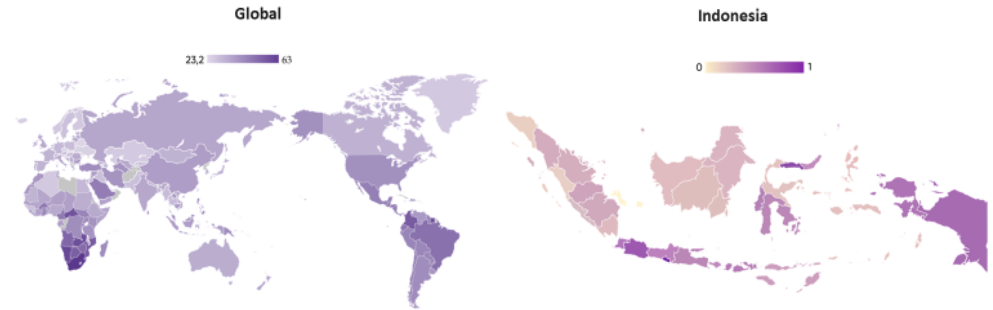
Pancasila merupakan landasan sistem perekonomian nasional yang secara lebih lanjut diatur dalam UUD 1945. Negara merupakan poros kegiatan ekonomi nasional yang mengupayakan tercapainya keadilan dan kemakmuran rakyat. Untuk itu, negara melakukan pengaturan terhadap beberapa aspek kehidupan, diantaranya terkait kesejahteraan serta ketenagakerjaan dan dunia usaha.

Pada dasarnya **Pancasila** dirancang untuk berada pada titik **merah muda**. Sementara dalam praktiknya terjadi pergeseran, dimana Pancasila menjadi lebih berada di titik **eklektik (pelangi)**, yakni campuran antara kuning, merah muda (sedikit komunis dan sedikit liberal), dan hijau.

Terdapat praktik ekonomi yang beragam pada negara-negara di dunia. Bagian ini akan membahas tentang perdebatan terkait dengan peran negara dalam praktik ekonomi yang berlangsung. Selanjutnya, bagian ini akan mencoba menetapkan posisi Indonesia dalam spektrum perdebatan sistem ekonomi yang berkembang.

Sumber: Dikembangkan dari Galtung(1996), Arts dan Gelissen (2010)

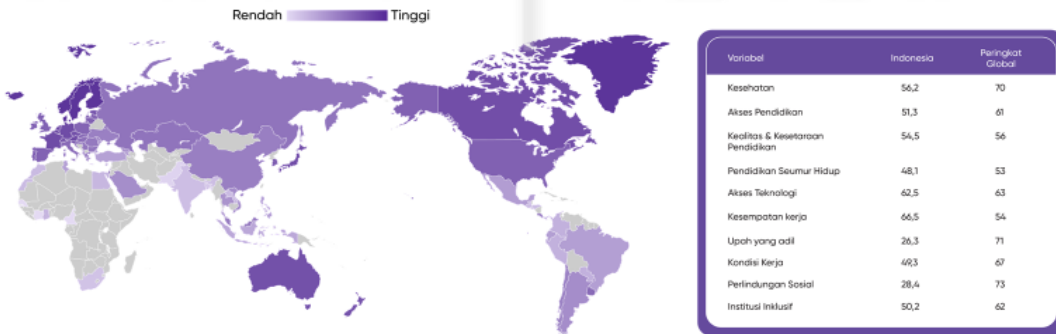
## Indeks Gini



Asesmen terhadap indeks Gini menunjukkan Indonesia berhasil memperoleh skor 37,9 atau **sedikit di atas rerata global** sebesar 37,8. Hasil penilaian tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari 163 negara. Secara lebih lanjut pada level provinsi, Bangka Belitung menjadi provinsi dengan perolehan rasio gini terendah. Sementara itu, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan perolehan rasio gini tertinggi.

Sumber: Diolah dari World Bank (2020) dan Badan Pusat Statistik (2022)

## Indeks Mobilitas Sosial Global

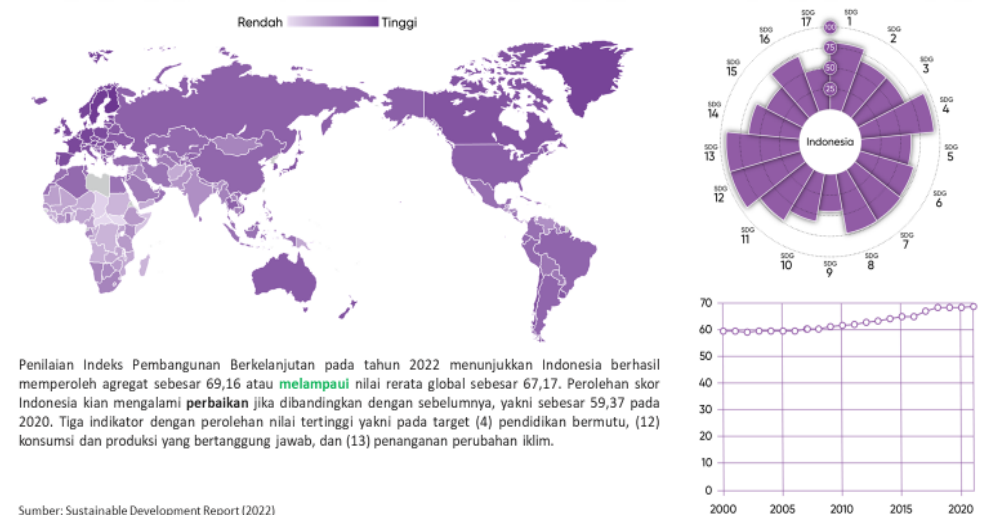


Laporan WEF untuk Indeks Mobilitas Sosial Global pada tahun 2020 menggambarkan isu dalam mobilitas sosial global berdasarkan rerata global pada 3 indikator yakni **pemberian upah yang adil (52,5)**, **perlindungan sosial (58,2)** dan **pendidikan seumur hidup (57,0)**.

Indeks ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-67 dari 82 negara. Adapun indikator terbaik Indonesia pada kesempatan kerja dengan skor 66,5 dan peringkat ke-54. Sementara itu, indikator terburuk Indonesia adalah pengupahan yang adil.

Sumber: Diolah dari World Economic Forum Global Social Mobility Indeks (2020)

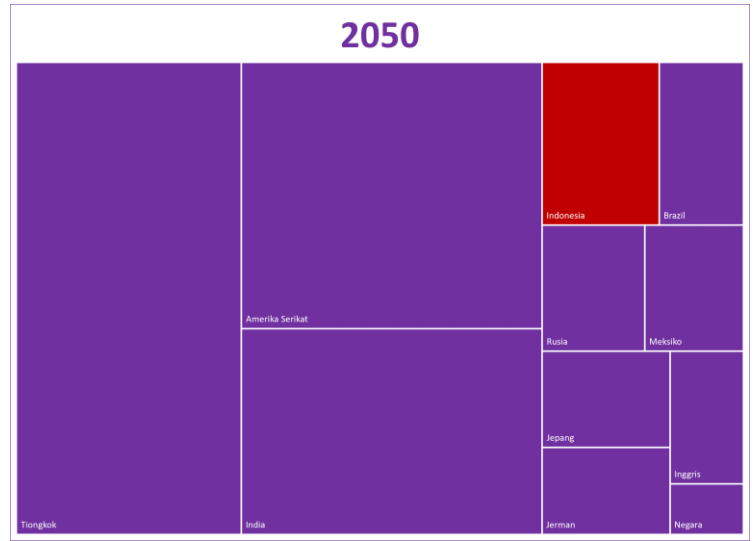
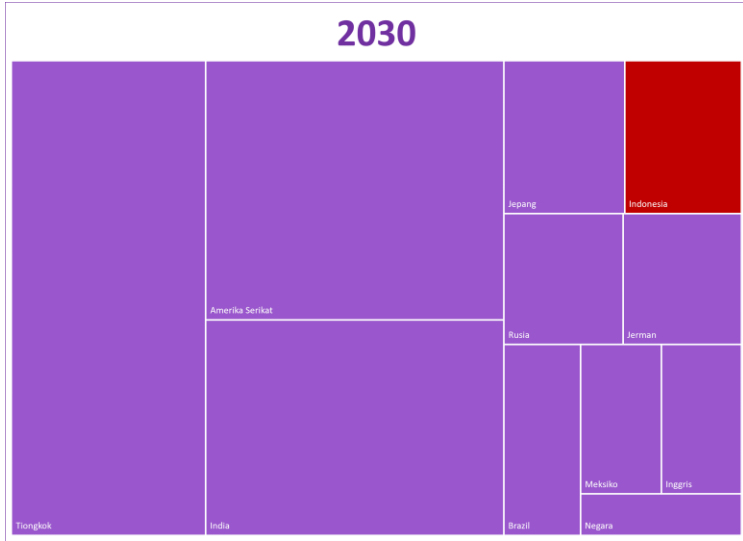
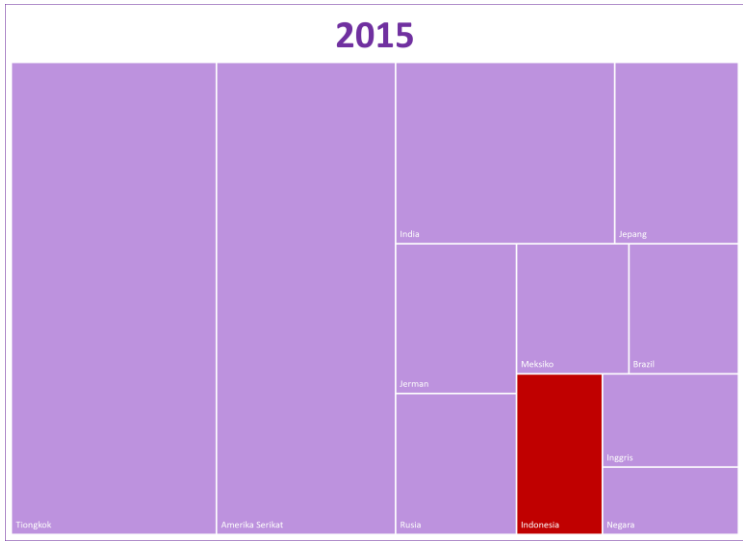
## Indeks Pembangunan Berkelanjutan



Penilaian Indeks Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2022 menunjukkan Indonesia berhasil memperoleh agregat sebesar 69,16 atau **melampaui** nilai rerata global sebesar 67,17. Perolehan skor Indonesia kian mengalami **perbaikan** jika dibandingkan dengan sebelumnya, yakni sebesar 59,37 pada 2020. Tiga indikator dengan perolehan nilai tertinggi yakni pada target (4) pendidikan bermutu, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan (13) penanganan perubahan iklim.

Sumber: Sustainable Development Report (2022)

# Proyeksi Indonesia 2050



AW | LEMHANNAS

